

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni.
- Chazawi, Adami. (2017). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Europe, Council of. (2005). *The Protection of Witnesses and Collaborators of Justice*. Adopted by the Committee of the Ministers of Council of Europe on 20 April 2005 and Explanatory Memorandum, Strasbourg: Council of Europe. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=dZHhsg42p8YC&pg=PA7&lpg=PA1&focus=viewport&dq=The+Protection+of+Witn esses+and+Collaborators+of+Justice:+Recommendation+Rec\(2005\)9+Ado pted+by+the+Committee+of+Ministers+of+the+Council+of+Europe+on+20 +April+2005+and+Explanatory+Memorandum&hl=id&output=html_text](https://books.google.co.id/books?id=dZHhsg42p8YC&pg=PA7&lpg=PA1&focus=viewport&dq=The+Protection+of+Witn esses+and+Collaborators+of+Justice:+Recommendation+Rec(2005)9+Ado pted+by+the+Committee+of+Ministers+of+the+Council+of+Europe+on+20 +April+2005+and+Explanatory+Memorandum&hl=id&output=html_text).
- Hartanti, Evi. (2012). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmal, Afriadi. KPK: Seharusnya Hakim Apresiasi Kosasih Abbas. Diakses pada 1 Mei 2019, WWW: <https://www.beritasatu.com/nasional/95659/kpk-seharusnya-hakim-apresiasi-kosasih-abbas>.
- Idirs, Aradila Caesar Ifmaini. “Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)”. Diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/eksaminasi-terhadap-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi-padapengadilan-negeri-jakarta-pusat-atas-nama-terdakwa-amir-fauzi-putusan-nomor-127-pid-sus-tpk-2015-pn-jkt-pst>.
- Ilyas, Amir dan Jupri. (2018). *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari <https://kbbi.web.id>.
- Kasiyanto, Agus. (2018). *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marpaung, Leden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi. (2013) “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Universitas

Sumatera Utara Law Journal Vol. II No. 2 Nov 2013. Diakses dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/5322/2281>.

Puspito, Nanang T, Marcella Elwina Simandjuntak, Indah Sri Utari dan Yusuf Kurniadi. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian.

Rachman, Dylan Aprialdo. Akibat Korupsi pada 2018 mencapai Rp 9,29 Triliun. Diakses pada 1 Mei 2019, WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Republik Indonesia. Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan terhadap Saksi Pelapor, Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

- Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.
- Sarwindaningrum, Irene dan Rini Kustiasih. Meninjau Ulang Justice Collaborator. Diakses pada 1 Mei 2019, WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/09343101/meninjau.ulang.justice.collaborator.?page=1>.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudrajat, Tedi. (2011). *Implikasi Hukum Pembatasan Peran serta Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Politik di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, September 2011. Diakses dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/169/117>.
- Surachmin, dan Suhandi Cahaya. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, (2014). *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.